

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan proses interaksi terhadap hubungan antar masyarakat internasional, mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi. Dari adanya perkembangan arus globalisasi mempengaruhi perubahan yang terjadi pada interaksi antar berbagai negara di dunia. penyebab dari berkembangnya interaksi adalah untuk menghindari terjadinya konflik di mana digunakan sebagai jalan keluar dalam hal mencapai kepentingan tiap negara.

Salah satu sistem interaksi yang mengalami perubahan adalah Diplomasi. Diplomasi dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan konflik sekaligus untuk mencari alternatif penyelesaian munculnya permasalahan baru. selain itu diplomasi juga digunakan dalam kegiatan hubungan internasional untuk mencapai kepentingan dari berbagai sektor pemerintahan, seperti politik, ekonomi maupun keamanan.

Revolusi teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam perubahan proses interaksi dalam diplomasi. Inovasi Teknologi merupakan salah satu unsur di dalam globalisasi yang menghilangkan penghalang komunikasi, mempermudah penyebaran informasi antar negara serta mempersempit jarak. Sehingga, revolusi teknologi informasi adalah salah satu faktor yang berfungsi dalam peningkatan peran dan fungsi dari keberadaan aktor-aktor non-negara seperti

Non Government Organization (NGO), media massa, dan Multi National Corporation (MNC).

Melebarnya peran dari aktor non-negara tersebut diikuti dengan kemunculan isu-isu low-politics, sebagai dampak dari bertambahnya persoalan didalam sistem global (National Intelligence Council, 2007:3-6). Dengan adanya keberadaan aktor-aktor non-negara serta aktivitas dalam praktik diplomasi mulai melibatkan masyarakat umum. Pemerintah menggunakan berbagai unsur didalam masyarakat sebagai alat diplomasi, sehingga keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan hubungan internasional menjadi praktik diplomasi dengan peranan yang penting.

Budaya merupakan salah satu unsur di dalam masyarakat yang memiliki peranan di dalam aktivitas diplomasi. Budaya merupakan pola perilaku yang dihasilkan dari adaptasi keadaan lingkungan dan dibangun, disepakati, dipelajari, serta dijalankan oleh masyarakat (Matthes, 2010:1). Budaya juga diakui sebagai pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khas, serta berbeda satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya teknologi informasi, budaya menjadi sebuah strategi yang digunakan dalam praktik diplomasi. Kemahiran untuk memperkenalkan budaya menjadi salah satu cara negara dalam menjalankan aktivitas diplomasinya. Dengan mempromosikan kebudayaan masyarakatnya, negara dapat memaksimalkan manfaat dari fungsi budaya yang terdapat di dalam Diplomasi Publik.

Mantan diplomat Amerika Serikat Edmund Guillon adalah orang pertama yang menggunakan istilah “Public Diplomacy” : Public Diplomacy adalah cara dimana pemerintah, kelompok swasta, dan individu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain dan pemerintah dengan sedemikian rupa menggunakan pengaruh pada keputusan kebijakan luar negeri mereka (Cho, 2012:279).

Diplomasi publik dilakukan dengan serangkaian strategi oleh banyak multipihak/stakeholder mulai dari departemen luar negeri, media, artis, rumah produksi, fansclub, individu korean netizen atau K-netz untuk mempromosikan hallyu di Tiongkok.

Hallyu umumnya dipahami sebagai meningkatnya popularitas budaya dan produk korea selatan di luar negeri (Kim, 2011:126). Hallyu muncul setelah korea memasuki tahap diplomasi dengan Tiongkok pada tahun 1992. Beijing youth daily salah satu media cetak di Tiongkok yang pertama kali menggunakan sebutan Hallyu dalam laporannya yang kesuksesan diraih oleh grup idola K-pop dalam penyelenggaraan konser di Beijing pada bulan november 1999 (Eun, Seok Lee, 2000:33).

Gelombang pertama menyebar melintas Asia Timur pada akhir 1990-an, ketika Boy Band Korea bernama H.O.T, Baby Vox, dan The National Ballet Company masuk ke pasar Tiongkok, yang kemudian diikuti oleh penayangan drama TV Korea ‘What is Love All About?’ yang disiarkan stasiun televisi ternama di Tiongkok, China Central Television (CCTV) pada tahun 1997 untuk pertama kali, meraih kesuksesan dengan mendapatkan rating dari penonton sebesar 4,2%

dimana lebih dari 150 juta masyarakat tiongkok menonton drama tersebut (<http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu> diakses pada tanggal 26 April 2020). membuat Hallyu populer di tiongkok dimana mengumpulkan banyak sekali penggemar disana.

Di tiongkok, Hallyu sering digambarkan sebagai fenomena yang hanya berlaku untuk “Hahanzu”, yakni suatu komunitas yang mencintai tidak hanya budaya K-pop saja tetapi juga setiap aspek lain dari negara korea selatan sehingga membuat mereka mempelajari bahasa korea, berdandan seperti selebriti korea , membeli produk-produk korea (Ji-Eun Kim, 2010:16). bahkan sudah ada pusat kebudayaan Korea Selatan di Tiongkok, yakni Beijing dan Shanghai (<http://www.korea.net/AboutUs/Overseas-Korea-Centers/Korean-Cultural-Centers> diakses pada tanggal 26 April 2020).

Hallyu mendapat perhatian khusus dikalangan masyarakat tiongkok, terutama bagi kalangan remaja karena adanya kesamaan budaya antara Korea Selatan dengan Tiongkok (<https://www.quora.com/Does-korea-have-a-big-influence-on-the-culture-of-China> diakses pada tanggal 26 april 2020). Selain itu adanya kesamaan nilai-nilai budaya, filosofi dan pemikiran yang sama sehingga memudahkan masyarakat tiongkok untuk menerima Hallyu Disamping itu Hallyu juga memiliki keterkaitan dengan budaya tradisional dan pop di tiongkok (<http://www.businessinsider.co.id/why-the-chinese-are-obsessed-with-korea-culture-2015-1/?r=US&IR=T#BGXci68gUuYiG7xi.9> diakses pada 26 april 2020).

Seiring berkembangnya Hallyu di Tiongkok, pemerintah kemudian memperluas penyebutan Hallyu tidak hanya mengenai musik , drama tetapi memiliki subjek baru yaitu, budaya tradisional, sastra, bahasa serta makanan. Hal ini dilakukan guna menarik perhatian banyak orang. Sejak saat itu baik drama maupun musik Korea menjadi populer bukan hanya di Kawasan Asia Timur saja melainkan telah mendapatkan popularitas di negara-negara lain termasuk meksiko, mesir, rusia, uzbekistan, mongolia, amerika serikat dan beberapa negara eropa lainnya (Lee, 2009:131-2).

Pada Februari 2016, Korea Selatan melakukan perundingan dengan Amerika Serikat terhadap penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan, yang disebabkan oleh Korea Utara kembali melakukan uji nuklir dan dianggap membahayakan keamanan negara, yang kemudian penempatannya diberi persetujuan oleh mantan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye pada bulan Juli tahun 2016. THAAD ditempatkan di wilayah Seongju dengan jumlah enam unit. Penempatan THAAD dilakukan melalui dua tahap, dua unit pertama ditempatkan pada bulan April 2017 dan empat unit lainnya ditempatkan pada September 2017.

Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD merupakan suatu perangkat antirudal milik Amerika Serikat hasil produksi dari Lockheed Martin Corp dan berfungsi sebagai alat untuk menangkal ancaman dari rudal balistik. THAAD berbeda dari rudal pertahanan biasa yang dirancang untuk mendekati target dan meledak dengan sendirinya untuk merusak atau membelokkan rudal.

THAAD dirancang untuk membenturkan peluru dengan peluru, rudal mengandalkan teknologi pencari infra merah untuk menemukan serta menyerang target, dan kemudian menghancurkan target sepenuhnya. (<https://www.bloomberg.com> diakses pada tanggal 18 april 2020).

Setelah Korea Selatan memberikan persetujuan terkait penempatan THAAD oleh Amerika Serikat, membuat Tiongkok yang telah mengetahui hal tersebut langsung menyatakan ketidaksetujuan. Tiongkok memiliki wilayah yang dekat dengan Korea Selatan, dimana jangkauan pelacak THAAD akan langsung masuk menuju ke wilayah Tiongkok dan juga dapat melacak persenjataannya.

Penempatan THAAD tidak menjadi fokus utama oleh Tiongkok, akan tetapi melihat pada kapasitas radar dengan estimasi jarak hingga 3000 km, radar tersebut dengan mudah dapat melacak persenjataan Tiongkok secara langsung, meskipun tidak secara keseluruhan, radar ini mampu masuk lebih jauh ke dalam wilayahnya dan menyebabkan sistem pertahanan nuklir dan persenjataannya dapat terlacak oleh sistem THAAD. (Habiburrahman : 2017).

Reaksi Tiongkok ditunjukkan dengan mengganggu aktivitas ekonomi Korea Selatan, seperti tidak memberikan perijinan terhadap segala bentuk Hallyu secara bertahap dimulai sejak bulan Agustus 2016. Dampak yang dirasakan Korea Selatan dari reaksi Tiongkok yaitu menurunnya jumlah turis dari Tiongkok di bulan Maret 2017 sebesar 66%, menurunnya ekspor produk makanan yang berjumlah 5,6%, dan juga penurunan jumlah penjualan dari perusahaan mobil Hyundai dan KIA sebesar 52%. Kemudian di industri hiburan, penurunan jumlah saham dari

perusahaan besar yang menaungi entertainer dari Korea Selatan, salah satunya SM Entertainment yang merupakan perusahaan talent terbesar di Korea Selatan turun sebanyak 8,2%. (<http://kpopherald.koreaherald.com> diakses pada tanggal 18 april 2020).

Beberapa acara di Tiongkok yang dibintangi oleh selebriti Korea Selatan dibatalkan, seperti Fan Meeting Event aktor Kim woo-bin dan Suzy Bae ditunda setelah mendapat pemberitahuan dari kepolisian Tiongkok mengatakan bahwa China Host ingin menunda event tersebut. Ada kemungkinan hubungan antara traditional dan Public Diplomacy dimana dapat dilihat melalui hubungan antara politik dan Hallyu.

Di bawah larangan, pemerintah Tiongkok menolak semua konser K-Pop (K-Pop) yang tidak disetujui, dan bahkan menyunting selebritas Korea dari iklan-iklan Tiongkok. Setiap pertunjukkan mengenai bakat Korea semua mengikuti pelarangan ini baik itu yang di danai oleh, berafiliasi dengan, atau diproduksi oleh perusahaan Korea (<https://www.koreaboo.com/news/china-begins-lift-ban-hallyu-content-country/> diakses pada tanggal 28 april 2020).

Tiongkok tidak mengalami kerugian dari melakukan pemboikotan terhadap klaster industri budaya Korea Selatan di Tiongkok. Tiongkok berhasil mengurangi keberadaan Hallyu di negaranya dimana sejalan dengan cita-cita Industri Budaya Tiongkok 2020. Berdasarkan blueprint yang dikeluarkan oleh kantor umum Communist Party of China (CPC) dan Dewan Negara, Tiongkok berencana untuk mengembangkan industri budayanya menjadi pilar ekonomi nasional pada tahun

2020 dengan mengembangkan merek-merek utama ,meningkatkan konsumsi dan meningkatkan struktur ekonomi.

Blueprint ini memuat outline program lima tahun ke-13 (2016-2020) tentang pengembangan dan reformasi budaya seperti menetapkan prinsip-prinsip panduan, tujuan utama, kunci proyek, serta dukungan kebijakan untuk reformasi budaya masa depan (Xinhua 2017). Hal yang dapat dilihat dari cita-cita Industri Budaya Tiongkok tahun 2020 adalah keinginan menjadikan klaster industri budaya sebagai pilar ekonomi, pemanfaatan media online dan memperluas jasa.

Ketika Tiongkok melakukan larangan terhadap Korea Selatan, negara tersebut justru tengah melakukan ekspansi terhadap budayanya sendiri. Dengan tidak adanya klaster industri budaya Korea Selatan yang menguasai pasar Tiongkok merupakan sebuah peluang yang menguntungkan bagi Tiongkok.

Namun, pada tanggal 9 Mei 2017 terpilihnya Moon Jae-in sebagai presiden Korea Selatan merupakan titik terang bagi hubungan korea dan Tiongkok dimana Tiongkok merasa bahwa Moon Jae-in memiliki pemikiran yang sama mengenai penanganan THAAD yaitu tidak menyetujui penempatan THAAD sebagaimana yang telah ditempatkan dengan persetujuan mantan presiden Korea Selatan Park Geun Hye. Tindakan tidak setuju Moon Jae-in ditujukan pada saat kampanyenya, saat telah terpilih menjadi presiden Korea selatan ini merupakan sebuah upaya awal yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dalam memperbaiki hubungannya kembali dengan Tiongkok.

Setelah terpilihnya menjadi presiden Moon Jae In, pihak Tiongkok mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Korea Selatan, diawali dengan kiriman ucapan selamat kepada Moon Jae-in melalui surat oleh Xin Jinping atas terpilihnya menjadi presiden Korea Selatan pada tanggal 10 Mei 2017 dan dilanjutkan dengan panggilan suara pada tanggal 11 Mei 2017.

Pada panggilan suara tersebut Xi Jinping menyatakan bahwa sebagai negara yang berada di wilayah Asia Timur, baik Tiongkok maupun Korea Selatan adalah negara-negara yang sangat penting di wilayah tersebut. Kedua negara ini harus tetap setia pada komitmen awal ketika mulai menjalin hubungan diplomatik, berusaha untuk mencari landasan bersama, serta menghormati kekhawatiran utama satu sama lain.

Mengenai normalisasi hubungan kedua negara, Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Tiongkok bersepakat terhadap pentingnya menjaga hubungan baik antara kedua negara. Mereka ingin kembali memperkuat pertukaran dan kerja sama di semua area secepatnya karena dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak (Choi 2017, FMPRC 2017).

Pencabutan Pelarangan Hallyu oleh pihak otoritas Tiongkok mulai terlihat di berbagai daerah. Dikonfirmasi oleh pejabat domestik dengan pengetahuan tentang industri CF Tiongkok, yang menyatakan bahwa pertanyaan dari perusahaan Tiongkok mengenai casting model dan artis Korea meningkat, menunjukkan bahwa pelarangan hiburan Korea perlahan-lahan dicabut. Diadakannya pembicaraan khusus antara presiden Asia Today Woo Jong-soon dan Long yuxiang, ketua

eksekutif Pusat Komunikasi Kebudayaan Nasional Tiongkok di Busan pada 12 Oktober bahwa dalam pembicaraan tersebut larangan Hallyu di Tiongkok akan segera dicabut pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan THAAD dengan mengakhiri larangan Hallyu.

Beberapa contoh menunjukkan mulai meredanya larangan Hallyu di Tiongkok, seperti penampilan Mamamoo K-pop asal Korea Selatan di acara televisi Tiongkok untuk membuat sebuah acara episode musik. Dalam konteks yang sama, platform online besar, yaitu iQiyi dan Youku mulai bergerak untuk melakukan impor drama Korea, dan China Central Center (CCTV) yang dikelola oleh pemerintah telah menayangkan program khusus pada Olimpiade PyeongChang 2018 selama 30 menit pada hari Rabu, Contoh lain adalah bahwa Phoenix Television menyiarkan obor obor Olimpiade PyeongChang secara langsung melalui saluran pertukaran Korea-Tiongkok pada hari Rabu. (https://www.huffpost.com/entry/china-virtually-ends-hallyu-ban_b_59fb14cae4b09afdf01c40a1 diakses pada tanggal 28 april 2020).

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa kajian literatur untuk menganalisis isu pelarangan Hallyu oleh pemerintah Tiongkok dari berbagai jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Namun, beberapa jurnal ini lebih memfokuskan kepada sisi upaya yang dilakukan oleh pihak Tiongkok untuk membangun kembali hubungan dibandingkan dengan sisi upaya dari Korea Selatan pasca konflik dimana membuat penelitian-penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian pertama terkait Soft Power yang berjudul “Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power Untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan” Ni Putu Elvina Suryani. Dari Program Magister Terorisme dalam Keamanan Internasional, Universitas Indonesia. Dalam penelitian ini berfokus kepada strategi Korea Selatan dalam menggunakan Korean Wave untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang bagi Korea Selatan yang dicapai berupa ekspor produk budaya dan juga melalui pemanfaatan kepopuleran Korean Wave di negara-negara lain menjadi daya tarik dan alat promosi dalam memasarkan produk bernilai ekonomi lainnya (<http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/8/210> diakses pada 28 april 2020).

Penelitian kedua berjudul “Upaya China Memperbaiki Hubungan Ekonomi Dengan Korea Selatan Pasca Permasalahan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ” oleh Ayu Lintya Ningrum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Penelitian ini lebih fokus dalam mengkaji mengenai upaya Tiongkok dalam memperbaiki hubungan ekonomi dengan Korea Selatan pasca permasalahan terminal high attitude area defense (THAAD) Tiongkok adalah negara yang mengganggu aktivitas ekonomi Korea Selatan dengan membuat kebijakan tidak resmi, yakni pelarangan terhadap bisnis dari Korea Selatan di negaranya, namun setelah dilakukan penempatan THAAD, Alasan utama Tiongkok berupaya untuk memperbaiki hubungan ekonomi dengan Korea Selatan yakni karena kedua belah pihak Korea yang sepakat berdialog untuk menghilangkan ketegangan di semenanjung Korea dan pemerintah Tiongkok memberikan

dukungan dalam proses tersebut.

(file:///C:/Users/user/Downloads/Jurnal,%20Ayu%20Lintya%20Ningrum%20(01-29-20-11-14-04)%20(1).pdf diakses pada 28 april 2020).

Penelitian ketiga berjudul : “Hubungan Pemerintah Korea Selatan-Chaebol Pasca Penerapan Sanksi Tiongkok Atas Penempatan THAAD 2016-2017” oleh Rosyiana Mutmainnah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini lebih fokus dalam mengkaji mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca adanya penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 karena dalam menjalankan perekonomiannya, Korea Selatan memiliki keunikan dimana bukan hanya pemerintah saja yang menjadi aktor utama, melainkan terdapat juga Chaebol yang merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara, dan tentunya juga memiliki peranan penting pada perkembangan ekonomi Korea Selatan (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13312/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=10&isAllowed=y> di akses pada 28 april 2020).

Penelitian keempat berjudul : “Pententangan Tiongkok Terhadap Korea Selatan Dalam Pengadaan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Di Korea Selatan Tahun 2016” oleh Habiburrahman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Dalam penelitian ini lebih fokus dalam melihat alasan-alasan pententangan Tiongkok terhadap THAAD di Korea Selatan. Kemampuan THAAD untuk menembak jatuh misil dari musuh ini merupakan sebuah ancaman tersendiri bagi Tiongkok, oleh karena kemampuan radarnya yang

dapat mencapai jarak 3000km sehingga membuat Tiongkok merasa terancam dengan hal ini, jika estimasi jarak ini benar maka radar THAAD dapat menembus kedalam teritorial Tiongkok sehingga dapat mendapatkan data alutsista dari Tiongkok, hal ini membuat Tiongkok secara tegas menentangnya dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang tentunya akan berdampak pada hubungan kedua negara (<https://media.neliti.com/media/publications/207252-none.pdf> diakses pada 28 april 2020).

Dengan adanya awal mula baik yang mulai terdektesi di antara hubungan Korea Selatan dan Tiongkok , maka penelitian ini kemudian akan lebih memfokuskan kepada cara Diplomasi Publik Korea Selatan pasca pencabutan pelarangan Hallyu di Tiongkok (2017-2019). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul “DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN PASCA PENCABUTAN PELARANGAN HALLYU DI TIONGKOK (2017-2019)”

Penelitian ini dibuat berdasarkan mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Diplomasi dan Negosiasi

Dalam mata kuliah ini membantu peneliti agar dapat memahami cara bagaimana teori atau konsep bisa menjadi unsur yang penting dalam politik luar negeri suatu negara untuk mencapai national interest. Diplomasi juga menjadi esensial dalam menjalin hubungan kerjasama untuk mempertahankan eksistensi negara ,

berkomunikasi dengan antar negara dan bentuk usaha dalam memenuhi kepentingan nasional.

2. Studi Strategis

Dalam mata kuliah Studi Strategis peneliti mendapatkan sebuah cara bagaimana teori atau konsep bisa digunakan untuk mencermati fenomena hubungan internasional. Dari mata kuliah ini peneliti tertarik untuk menggunakan Prisoner's Dilemma untuk melihat fenomena hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Diplomasi Publik Korea Selatan Pasca Pencabutan Pelarangan Hallyu Di Tiongkok?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana bentuk pelarangan Hallyu di Tiongkok?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam Diplomasi Publik Hallyu di Tiongkok?
3. Apa yang menjadi kendala bagi Korea Selatan dalam Diplomasi Publik Hallyu di Tiongkok?

4. Bagaimana perkembangan komersialisasi Hallyu di Tiongkok?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada isu hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok, penulis melihat bahwa hubungan antara kedua negara ini bergantung antar satu dengan yang lain. Yang kemudian dengan adanya ancaman rudal oleh Korea Utara membuat Korea Selatan memutuskan untuk memasang sistem THAAD milik Amerika. Namun ternyata keputusan tersebut mengundang penolakan dari pihak Tiongkok. Sehingga membuat Tiongkok memutuskan untuk memberlakukan sanksi pelarangan Hallyu kepada Korea Selatan. Sementara itu, yang menjadi fokus penelitian ini adalah upaya dari Korea Selatan menggunakan elemen yang terdapat dalam Diplomasi Publik pasca pencabutan Hallyu di Tiongkok. Penulis akan membatasi periode penelitian dari dicabutnya sanksi pelarangan Hallyu di Tiongkok 2017 – 2019 dengan tujuan agar lebih memfokuskan pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Alasan dari pengambilan kurun waktu tersebut karena mulai terdekteksinya perbaikan hubungan di antara Korea Selatan dan Tiongkok pasca pelarangan Hallyu dicabut.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud agar peneliti dapat mengetahui bagaimana Diplomasi Publik Korea Selatan Pasca Pencabutan Pelarangan Hallyu di Tiongkok.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui bentuk pelarangan Hallyu di Tiongkok
2. Mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam Diplomasi Publik Hallyu di Tiongkok
3. Mengetahui apa yang menjadi kendala bagi Korea Selatan dalam Diplomasi Publik Hallyu di Tiongkok
4. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perkembangan komersialisasi Hallyu di Tiongkok.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sebuah ilmu bagi para mahasiswa. Terlebih mahasiswa Hubungan Internasional yang tertarik mengenai soft diplomacy khususnya publik dan menjelaskan bahwa kebudayaan juga dapat menjadi sebuah objek penelitian yang relevan dan bukan hanya sebatas hiburan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah saran kepada pemerintah dalam melihat kesuksesan Korea Selatan yang menggunakan kebudayaan sebagai alat diplomasi ekonomi dan menjadi salah satu alat penting dalam diplomasi.